

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan, selain puji syukur yang sangat dalam ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat limpahan rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya akhir ini dengan judul "Analisa Peranan Dewan Pengawas Dalam Pencapaian Good Pension Governance – (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Perum Peruri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Indonesia.

Sudah barang tentu penyusunan karya akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang dalam dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian karya akhir ini yaitu kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu Mertua tersayang yang selalu memberikan doa restu walaupun berada di rumah nun jauh di sana.
3. Yuni Triastuti RH, istriku tercinta yang selalu berdoa kepada Allah SWT serta dengan sabar menemani dan memberikan dorongan semangat yang luar biasa tanpa kenal lelah dalam penyelesaian karya akhir ini.
4. Jagoan-jagoanku tersayang, Rasyid dan Faris, yang menjadi "obat penghilang pusing" dan penyemangat untuk menyelesaikan karya akhir ini.
5. Semua Saudara-saudara yang telah memberikan doa restu yang tak henti-hentinya kepada penulis
6. Bapak Prof. Dr. Siddharta Utama, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan selama penyusunan karya akhir ini.
7. Mbak Bona dan Mbak Kristin yang telah dengan sabar menjadi penghubung antara penulis dengan dosen pembimbing selama masa bimbingan karya akhir ini.

8. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Seluruh staf administrasi Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi selama masa kuliah dan penyelesaian karya akhir.
10. Bapak Sudarmadji dan Tri Tatmono serta Pendiri, Pengawas dan Pengurus serta seluruh staf Dapetri yang telah ikhlas dan sabar dalam membantu penulis menyediakan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya akhir.
11. Pak BU, pak Adi Sumarno dan mbak Ananta yang dengan penuh semangat membantu penulis dalam menyelesaikan pekerjaan kantor sehingga penulis dapat mencurahkan tenaga dan pikiran bagi penyelesaian karya akhir ini.
12. Rekan-rekan kelas G 2005 dan program STK yang telah bersama-sama menimba ilmu selama selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan karya akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya akhir ini senantiasa penulis harapkan. Mudah-mudahan penulisan karya akhir ini dapat memberikan banyak manfaat, sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang pengawasan dana pensiun.

Jakarta, April 2008

Penulis

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance yang cukup penting peranannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus. Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris.

Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dan arahan Pendiri. Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari pelaksanaan peraturan GPFPG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP-136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Sebagai akibatnya, praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian GPFPG pada Dapetri.

Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFPG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun.

Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFPG pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun *benchmarking* dengan *best practices* Komisaris bank umum.
2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan *best practices* dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA).
3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa kesesuaiannya dengan *best practices* dana pensiun internasional.

Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri. Kondisi ini terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan peralihan. Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada *best practices* dana pensiun internasional.

Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPF, saat ini Dapetri telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal. Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi mencapai praktek GPF yang lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	4
1.5. Sistematika Pembahasan	5
Bab II Landasan Teoritis	
2.1 Definisi dan Prinsip <i>Corporate Governance</i>	7
2.2 <i>Corporate Governance Framework</i>	8
2.3 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	10
2.4 <i>Overview</i> Peranan Dewan Komisaris dalam <i>Corporate Governance</i>	12
2.4.1. Persyaratan untuk Dewan Komisaris Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia	12
2.4.2. Praktek Dewan Komisaris di Indonesia	13
2.4.3. Komisaris Independen	14
2.4.4. Dewan Komisaris dan Komite-komite	16
2.5 <i>Overview Corporate Governance</i> pada Bank	17
2.6 Peranan Komisaris dalam Pelaksanaan GCG di Bank	19
2.6.1. Kewajiban Komisaris Terkait Dengan Pelaksanaan GCG	19
2.6.2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	27
2.6.3. Hal-hal Lain Yang Dapat Memperkuat Peran Komisaris Dalam Implementasi GCG	29

2.7	Manajemen Umum Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	32
2.7.1	Status Kelembagaan Dana Pensiun (DPPK)	32
2.7.2	Hubungan Kelembagaan Dana Pensiun Dengan Pendiri	33
2.7.3	Organ Dana Pensiun	34
2.7.4	Kegiatan Dana Pensiun	35
2.8	Overview Governance pada Dana Pensiun di Indonesia	38
2.8.1	Dasar Penerapan GPFGB Bagi Dana Pensiun di Indonesia	40
2.8.2	Peranan Dewan Pengawas Dalam Pelaksanaan GPFGB di Dana Pensiun	41
2.8.3	Prinsip Dasar Dewan Pengawas	41
2.8.4	Pedoman Umum Dewan Pengawas	42
2.8.5	Pola Hubungan Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus	44
2.9	<i>International Best Practices For Pension Fund Governance</i>	45
2.9.1	OECD Guidelines For Pension Fund Governance	46
2.9.2	CAPSA Pension Governance Guidelines	49
<b>Bab III Latar Belakang Organisasi</b>		
3.1.	Informasi Umum Dana Pensiun Perum Peruri (DAPETRI)	52
3.1.1.	Sejarah Singkat	52
3.1.2.	Moto, Visi Dan Misi	53
3.1.3.	Struktur Organisasi	54
3.1.4.	Kepesertaan	55
3.1.5.	Iuran dan Manfaat Pensiun	56
3.1.6.	Kekayaan, Investasi dan Hasil Investasi	57
3.2.	Sekilas Good Pension Fund Governance pada DAPETRI	60
3.2.1.	Prinsip Dasar GPFGB	60
3.2.2.	Maksud dan Tujuan Pelaksanaan GPFGB	60
<b>Bab IV Analisis Dan Pembahasan</b>		
4.1.	Kondisi ( <i>Current Practices</i> ) Dewan Pengawas DAPETRI	63
4.1.1.	Tujuan dan Fungsi Dewan Pengawas	64
4.1.2.	Mekanisme Penunjukkan dan Penggantian Dewan Pengawas	64
4.1.3.	Keanggotaan Dewan Pengawas	65

4.1.4.	Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas	66
4.1.5.	Rapat-rapat Dewan Pengawas	68
4.1.6.	Akuntabilitas Dewan Pengawas	69
4.1.7.	Program Pengembangan Anggota Dewan Pengawas	69
4.2.	Perbandingan Antara Praktek-praktek Dewan Pengawas Dengan Berbagai Standar dan Aturan Maupun <i>Best Practice</i> Komisaris Bank	70
4.2.1.	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	70
4.2.2.	Badan Pengelola	73
4.2.3.	Bantuan Tenaga Ahli, Keberadaan Auditor Eksternal dan Aktuaris	74
4.2.4.	Akuntabilitas	75
4.2.5.	Kesesuaian	76
4.2.6.	Pengendalian Internal	77
4.2.7.	Pelaporan	77
4.2.8.	Pengungkapan Informasi	79
4.2.9.	Mekanisme <i>Fit and Proper Test</i>	80
4.2.10.	Independensi Anggota Dewan Pengawas	80
4.2.11.	Risalah Rapat Dewan Pengawas	81
4.2.12.	Penilaian Kinerja Dewan Pengawas	82
4.2.13.	Pengawasan Manajemen Risiko	82
4.2.14.	Mekanisme Kontrol Terhadap Konflik	83
4.2.15.	Program Pengembangan Dewan Pengawas	84
4.3.	Perbandingan Antara Standar dan Aturan Yang Berlaku Dengan <i>Best Practice</i> Internasional	84
4.3.1.	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab ( <i>Identification of Responsibilities</i> )	84
4.3.2.	Badan Pengelola ( <i>Governing Body</i> )	85
4.3.3.	Bantuan Tenaga Ahli, Keberadaan Auditor Eksternal dan Aktuaris	86
4.3.4.	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	86
4.3.5.	Kesesuaian ( <i>Suitability</i> )	87

4.3.6. Pengendalian Internal ( <i>Internal Control</i> )	88
4.3.7. Pelaporan ( <i>Reporting</i> )	89
4.3.8. Pengungkapan Informasi ( <i>Disclosure</i> )	89
4.3.9. <i>Redress</i>	90
4.3.10. Mekanisme <i>Fit and Proper Test</i>	90
4.3.11. Independensi Anggota Dewan Pengawas	91
4.3.12. Risalah Rapat Dewan Pengawas	91
4.3.13. Penilaian Kinerja Dewan Pengawas	91
4.3.14. Pengawasan Manajemen Risiko	92
4.3.15. Mekanisme Kontrol Terhadap Konflik	92
4.3.16. Program Pengembangan Dewan Pengawas	92
4.4. Penyajian Kesesuaian <i>Current Practices</i> Dewan Pengawas DAPETRI Dengan Standar Maupun <i>Best Practice</i> Menggunakan Tabel	93
4.4.1. Penilaian Kesesuaian <i>Current Practices</i> Dewan Pengawas Dapetri dengan Standar dan Aturan Yang Berlaku di Indonesia	93
4.4.2. Penilaian Kesesuaian Standar dan Aturan Terkait Praktek Dewan Pengawas Dana Pensiun Yang Berlaku di Indonesia Dengan <i>International Best Practices</i> (CAPSA & OECD)	98
Bab V Simpulan Dan Saran	
5.1. Simpulan	103
5.2. Saran	104
Daftar Pustaka	106
Lampiran	